

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NATANGSA SURBAKTI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan A. Yani Pabelan Kartasura Surakarta 57102,
Telp. (0271) 717417 Psw. 144, email: natangsas@yahoo.com

ABSTRACT

*The research aims at examining the characteristics of Islamic criminal law enforcement, co-existence of Islamic justice system (sharia law) and criminal justice system, and the factors inhibiting law enforcement in the Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) province. The method employed in this research is normative empirical using qualitative data analysis technique. The result of the research shows that certain types of crime that become the competence of the Islamic judicial is based on provincial regulations called *Qanun*; therefore, the criminalization that occurs do not reduce the jurisdiction of civil court. Moreover, the result of the research also shows that the various factors which theoretically are known as factors supporting law enforcement are not working properly.*

Keywords: law enforcement, Islamic criminal law, Qanun, Islamic justice system

I. PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, memperoleh kewenangan untuk menjalankan secara penuh syari'at Islam di seluruh wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, kewenangan menjalankan syariat Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Kewenangan penegakan syariat Islam ini kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan *qanun* atau *qanun syariah*. Hingga tahun 2004 telah dibentuk lima qanun sebagai payung hukum. Penyusunan berbagai qanun tersebut dilakukan dengan bertumpu pada garis-garis kebijakan yang rasional dan dituangkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999.

Berdasarkan Perda tersebut, Syari'at Islam yang ditulis dan diberlakukan di Aceh harus bersifat *kaffah* yang ditegakkan di atas tiga prinsip utama: (1) berpegang kepada

Al-qur'an dan Sunnah secara penuh; (2) melakukan pemahaman dan penalaran atas ketentuan Al-qur'an dan Sunnah tersebut berdasarkan metode ilmiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini dalam bingkai NKRI, serta (3) berorientasi ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan umat yang muncul karena pembangunan dan kemajuan di abad ke dua puluh satu miladiah atau kelima belas hijriyah (Abubakar, 2007: 17).

Sebagai sebuah masyarakat, provinsi NAD telah sejak lama dikenal sebagai daerah “serambi Mekkah” (Rijal, 2007: 88). Dengan status ini berarti NAD merupakan habitat sosial syari'at Islam yang paling terkemuka di tanah air. Adanya stereotipe ini mengesankan bahwa syari'at Islam termasuk jinayah, dengan sendirinya dapat ditegakkan dengan mudah berkat pemahaman serta semangat keagamaan yang baik dari seluruh lapisan masyarakatnya. Bertitik tolak dari pemikiran inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penegakan syari'at Islam khususnya jinayah di provinsi NAD.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi NAD?; (2) Bagaimanakah implementasi pembagian yurisdiksi di antara peradilan pidana Islam dengan peradilan pidana umum di provinsi NAD?; (3) Faktor-faktor apakah yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana Islam (Jinayah) di provinsi NAD?

Penelitian ini bertujuan, *pertama*, mengidentifikasi karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang diimplementasikan di provinsi NAD; *kedua*, mengetahui pembagian kewenangan di antara peradilan syariah dengan peradilan pidana umum; *ketiga*, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Provinsi NAD.